

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹³

Menurut James, pengertian dari sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.¹⁴ Penerapan sistem bagi suatu atau sekelompok aktivitas dimaksudkan agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terselesaikan dengan baik, tertata dan secepat mungkin sehingga tujuan yang diinginkan dapat segera tercapai.

Sedangkan pengertian dari pengendalian internal adalah suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai

¹³ EX. Kurniawan Tjakrawala, *Sistem Pengendalian Manajemen ...*, hal 7

¹⁴ James A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat*, terj. Dewi Fitria Sari dan Deny Arnos Kwary, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal 6.

tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi.¹⁵

Menurut Mulyadi, tujuan dari pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu: (1) Keandalan pelaporan keuangan; (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta; (3) Efektivitas dan efisiensi operasi.¹⁶

b. Elemen-elemen sistem pengendalian

Menurut Siswanto, dalam setiap sistem pengendalian, terdapat empat elemen pokok yang satu sama lain berlangsung dalam urutan yang kronologis dan kontinu serta di antara keempat elemen pokok tersebut berhubungan. Keempat elemen pokok pengendalian yang dimaksud adalah: (1) Kondisi atau karakteristik yang dikendalikan; (2) Instrumen atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau karakteristik yang dikendalikan; (3) Kelompok, unit, atau instrumen kendali yang akan membandingkan data yang diukur dengan pekerjaan yang direncanakan dan mengarahkan mekanisme perbaikan untuk

¹⁵ Mulyadi, *Auditing...*, hal 180.

¹⁶ *Ibid*, hal 180.

memenuhi kebutuhan; serta (4) Kelompok atau mekanisme yang bergerak dan mampu mengadakan inovasi dalam sistem operasi.¹⁷

c. Jenis-jenis Pengendalian

Ditinjau dari pelaksanaannya, pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:¹⁸

1) Sistem pengendalian umpan balik.

Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian umpan balik biasanya terdiri atas lima komponen berikut: (1) Proses operasi yang mengolah masukan menjadi keluaran; (2) Karakteristik proses; (3) Sistem pengukuran; (4) Serangkaian standar atau kriteria; (5) Pengatur yang berfungsi sebagai pembanding.

2) Sistem pengendalian umpan maju

Sistem pengendalian umpan maju ini hadir dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada permasalahan potensial

¹⁷ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal 141-142

¹⁸ *Ibid*, hal 143

mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. Sistem pengendalian umpan maju mempunyai komponen yang sama dengan sistem pengendalian umpan balik.

3) Sistem pengendalian pencegahan

Sistem pengendalian pencegahan adalah kebijakan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. pengendalian pencegahan merupakan pengendalian internal organisasi. Komponen yang ada di dalam sistem ini adalah kebijakan internal dan prosedur internal.

Jika ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pengendalian dapat dibedakan menjadi empat jenis pokok, yaitu: ¹⁹

1) Pengendalian sebelum tindakan (*Preaction Controls*)

Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum tindakan dimulai maka sumberdaya manusia, bahan, dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan. Dengan demikian, apabila kegiatan dilakukan, sumber daya tersebut tersedia, baik jenis, kualitas kuantitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan.

2) Pengendalian kemudi (*Steering Controls*)

Pengendalian ini dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan

¹⁹ *Ibid*, hal 143

tindakan perbaikan sebelum suatu urutan kegiatan tertentu diselesaikan.

3) Penyaringan atau pengendalian ya/tidak (*Screening or Yes/No Controls*)

Pengendalian penyaringan berguna sebagai alat kendali ganda (*double check*) sekaligus menyempurnakan pengendalian kemudi. Pengendalian ya atau tidak merupakan suatu proses penyaringan yang aspek-aspek spesifik dari suatu prosedurnya harus disetujui atau syarat tertentu dipenuhi sebelum aktivitas dapat diteruskan.

4) Pengendalian setelah tindakan (*Post Action Controls*)

Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan dan temuan tersebut diaplikasikan pada aktivitas yang sama di masa mendatang.

d. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain:²⁰

1) Pengendalian Lingkungan

Pembentukan suasana organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi, yang

²⁰ Mulyadi, *Auditing...*, hal 183-195

merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian internal lain yang melahirkan hierarki dalam membentuk struktur organisasi. Lingkungan pengendalian memiliki tujuh komponen, antara lain:

a) Integritas dan nilai-nilai etis

Efektifitas pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian internal yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian internal. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai integritas yaitu suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Dalam berbisnis, manajemen yang memiliki filosofi ini akan meletakkan kejujuran sebagai dasar bisnisnya. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan.

d) Partisipasi dewan komisaris dan komite pemeriksaan

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).

e) Struktur organisasi

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat mencapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan rangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur organisasi suatu

entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

f) Kebijakan dan praktik SDM

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Pengendalian internal yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur.

g) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

2) Penilaian Risiko

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya.

3) Pengendalian Aktivitas

Kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan sebagai mana seharusnya.

4) Informasi dan Komunikasi

Diperlukan untuk semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan sebelumnya.

5) Monitoring

Merupakan sebuah proses penilaian berkelanjutan dan periodik pelaksanaan internal apakah sudah terlaksana dengan baik dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal.

e. Karakteristik pengendalian yang efektif

Pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa penyimpangan dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Secara umum

pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:²¹(1) Akurat (*Accurate*); (2) Tepat waktu (*Timely*); (3) Objektif dan komprehensif (*Objective and Comprehensible*); (4) Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focused on Strategic Control Points*); (5) Secara ekonomi realistik (*Economically Realistic*); (6) Secara organisasi realistik (*Organizationally Realistic*); (7) Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the Organization's Work Flow*); (8) Fleksibel (*Flexible*); (9) Preskriptif dan Operasional (*Prescriptive and Operational*); dan (10) Diterima para anggota organisasi (*Accepted by Organization Members*).

2. Kajian Teoritis Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank

²¹ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal 149

Indonesia.²² Sedangkan Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah:²³

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”

Untuk memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni aman, lancar dan menguntungkan.²⁴

b. Jenis-jenis risiko kredit atau pembiayaan

Dalam melakukan bisnis dibidang pengelola keuangan, perbankan maupun lembaga keuangan syariah akan menghadapi berbagai jenis risiko pembiayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Risiko Modal

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran apabila kinerja aset-aset itu tidak baik. Sumber-sumber

²² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal 196

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal 163

²⁴ *Ibid*, hal 164

risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan.²⁵

2) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya. Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan seperti kemungkinan debitur tidak dapat melunasi utangnya, obligasi yang dibeli bank, tidak membayar kupon dan/atau pokok utang atau terjadinya *non-performance* (gagal bayar) dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain.²⁶

3) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas yaitu risiko yang timbul akibat kurang tersedianya alat-alat likuid bank sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya baik untuk memenuhi penarikan titipan

²⁵ H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hal 143

²⁶ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal 106

oleh para penyimpan maupun memberikan pinjaman kepada calon debitur.²⁷

c. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:²⁸

1) Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana.

Di samping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlakukan).

2) Proses Evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga

²⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal 204-206

²⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hal 209

diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat.

Proses penilaian dimaksud meliputi:²⁹

- a) Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap. Dengan kata lain, permohonan yang tidak didukung dengan data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses.
- b) Proses penilaian yang dilakukan baik dari kantor pusat maupun kantor cabang.
- c) Format memo atau nota penilaian yang dibuat. Format memo atau nota tersebut meliputi informasi umum terkait anggota atau perusahaan, aspek legalitas perusahaan, aspek manajemen perusahaan, aspek pemasaran, aspek sosial ekonomi, aspek tenaga kerja, aspek teknis, aspek keuangan, aspek komersial, agunan atau jaminan, analisis risiko, pertimbangan, kesimpulan, saran, keputusan.

d. Administrasi Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembiayaan di bank syariah adalah:³⁰

1) Penerimaan keputusan

Baik dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang bersangkutan.

²⁹ *Ibid*, hal 209-213

³⁰ *Ibid*, hal 214

2) Penerusan kepada nasabah pemohon

Macam keputusan, pembiayaan ditolak atau diterima. Penyampaian keputusan atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan dan klausula.

3) Penandatanganan akad

Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat petugas bank

e. Pengamanan Pembiayaan

Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut:³¹

1) Sebelum realisasi pembiayaan

Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikatan agunan (jika diperlukan). Setelah itu, baru pembiayaan dapat dicairkan.

2) Setelah realisasi pembiayaan

³¹ *Ibid*, hal 214

Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank, dan jangan sampai “bocor” dalam arti lari ke hal-hal di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiasaan dan kontrol (pemantauan) atas aktivitas bisnis nasabah.

f. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:³²

- 1) *Character* yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

³² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan bank Syariah...*, hal 80-84

- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.
- 5) *Condition of economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi ekonomi.

3. Kajian Teoritis Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga jual dengan harga beli disebut dengan margin keuntungan.³³

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diharamkan oleh Allah SWT karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang memiliki prinsip jual beli, seperti pada Firman berikut:

³³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 32-33

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ ... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah: 275) ³⁴

b. Syarat *Murabahah*

Dalam melakukan transaksi pembiayaan murabahah terdapat beberapa syarat yang harus ditaati, yaitu (1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, (2) Kontrak harus bebas dari riba, (3) Kontrak harus bebas dari riba, (4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, (5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, dan misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (2), atau (3) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual atau membatalkan kontrak. ³⁵

c. Aplikasi dalam perbankan

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli diaplikasikan dalam murabahah (*deferred payment sale*), yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*)

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hal 39

³⁵ Muhammad shafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Sinar Terang Grafika, 2001), hal 102

dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka dibawah satu tahun (*short run financing*).³⁶

d. Manfaat dan risiko pembiayaan *murabahah*

Manfaat dari Pembiayaan *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaanya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.³⁷ Namun selain manfaat pembiayaan ini juga mempunyai risiko yaitu (1) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, (2) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah, dan (3) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Papalangi,³⁹ yang bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diterapkan pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado dalam menunjang efektifitas pemberian kredit UKM, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari data primer. Hasil analisis

³⁶Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.191

³⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah ...*, Hal. 106

³⁸Binti Nur asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hal. 227

³⁹ Riska S. Papalangi, "Penerapan SPI dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit UKM pada PT.BRI (PERSERO) TBK Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Hal 1212-1220, (September, 2013), dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 11:36 WIB

yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi sebagian unsur-unsur pengendalian internal. BRI mempunyai persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut. Hal-hal tersebut telah membuktikan bahwa SPI pada PT. BRI telah sesuai dengan teori yang ada.

Pada kesempatan lain Harun⁴⁰ melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan struktur pengendalian intern dalam menunjang efektifitas pemberian kredit usaha pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Boulevard Manado pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari data primer. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern kredit usaha pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Boulevard Manado sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik sesuai dengan teori pengendalian yang baik.

Nadia dan Darsono melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui penerapan struktur pengendalian internal terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pecegahan pengembalian macet yang diberikan oleh Bank BNI Syariah cabang Semarang. Metode analisis yang

⁴⁰ Hesty Harun, "Penerapan SPI dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit Usaha pada BRI KCP Boulevard Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 Hal. 294-303, (September, 2013), dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 11:42 WIB.

digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang digunakan adalah data primer. Di Bank BNI Syariah telah dilakukan sistem pengendalian internal sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Selain itu, untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet pihak bank juga menerapkan pemberian *reward* bagi karyawan agar selalu meningkatkan kinerjanya.⁴¹

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et. all. dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal dalam pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng sudah dapat dikatakan efektif atau belum. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang digunakan adalah data primer. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan untuk tiap-tiap elemen-nya sudah efektif dan dikategorikan sudah memadai.⁴²

Dari beberapa penelitian di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka akan ditemukan persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham suatu perusahaan di pasar saham. Persamaan

⁴¹ Nadia Maya Sari dan Darsono, “Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang”, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.1 No.1 , (2012), dalam http://eprints.undip.ac.id/35757/1/JURNAL_NADIA.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 11:33 WIB

⁴² Raga Fahmy Darmawan, et. All., “Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)”, *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Progam S1*, Vol.3 No.1 , (2015), dalam <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1akarticleviewFile48053632> diakses pada tanggal 08 Maret 2016 pukul 13:39 WIB

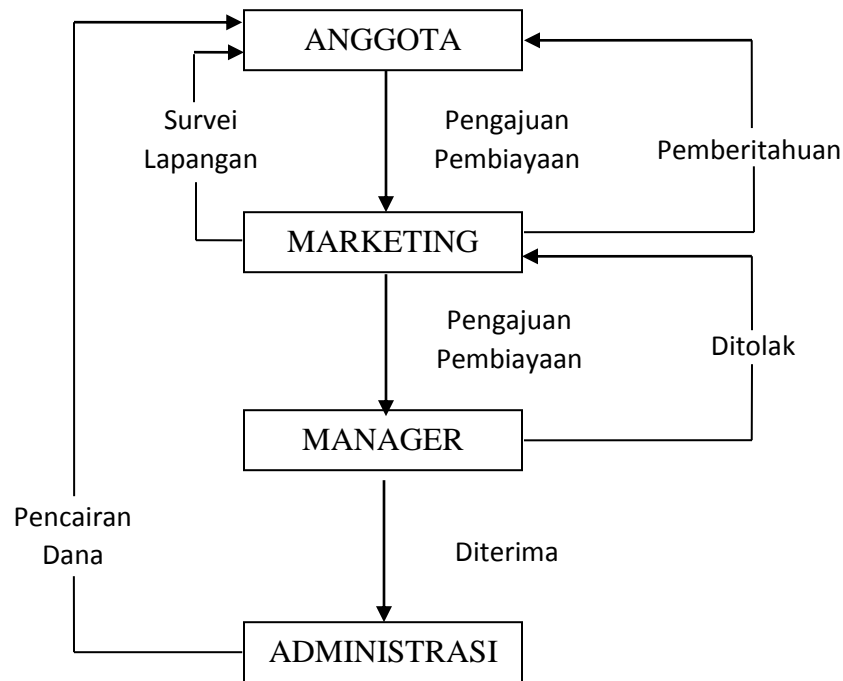
lainnya adalah persamaan pada sumber data dan teknik analisis data yang digunakan. Sumber data dari penelitian ini maupun penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan data primer yang berasal dari kegiatan observasi dan juga wawancara. Dan rata-rata dari penelitian di atas memiliki tujuan yaitu mengetahui penerepan sistem pengendalian internal pada suatu lembaga.

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian dan kompleksitas variabel bebas yang digunakan. Variabel bebas dalam penelitian ini mengacu pada pembiayaan murabahah, tetapi dalam penelitian sebelumnya variabel bebas yang diteliti lebih beragam, seperti kredit UKM, kredit usaha dan keseluruhan pembiayaan yang diterapkan.

C. Paradigma Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dari teori yang telah dibahas, maka dapat disusun paradigma penelitian yang menggambarkan tentang Sistem Pengendalian Internal dan Implementasinya terhadap Persetujuan Pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Paradigma Pemikiran



Sumber: Analisis Proses Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk memperoleh pembiayaan maka anggota harus mengajukan pembiayaan kepada marketing disertai dengan persyaratan yang lengkap. Setelah anggota memberikan berkas pengajuan pembiayaan disertai dengan persyaratan, pihak marketing akan melakukan survei lapangan terhadap anggota tersebut. Setelah melakukan survei, marketing akan membuat laporan tertulis mengenai keadaan anggota baik tentang pribadi maupun usaha anggota. Setelah laporan tertulis maka marketing akan

mengajukan pembiayaan tersebut kepada manager untuk dapat dinilai layak atau tidak pembiayaan tersebut diterima.

Jika pembiayaan tersebut dianggap layak diterima maka manager akan memberikan surat keputusan beserta uang terhadap pihak administrasi. Pihak administrasi akan menghubungi anggota tersebut untuk melakukan akad sekaligus pencairan dana. Namun jika pembiayaan tersebut dianggap tidak layak maka manager akan menghubungi pihak marketing lagi untuk memberitahukan bahwa lembaga tidak dapat menyetujui pembiayaan yang diajukan.